



Nomor : 84/WK/SEKPER/2024

Jakarta, 13 Agustus 2024

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil
RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita
Karya Tahap IV Tahun 2019**

Dengan hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas **Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019** yang telah dilaksanakan pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Hasil RUPO yang telah dilakukan pada Selasa, 13 Agustus 2024 pada Surat Kabar Investor Daily Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Direksi

RASIO MAKIN SUSUT

RPOJK UMKM Tak Singgung
Porsi Kredit 30%

JAKARTA, ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Rancangan Peraturan OJK Usaha Mikro Kecil dan Menengah (RPOJK UMKM) dan tidak lama lagi akan diterbitkan menjadi POJK. RPOJK tersebut tidak memuat kewajiban terkait porsi kredit UMKM 30% terhadap total kredit.

Oleh Nida Sahara

Saat ini, RPOJK UMKM dalam tahap analisis hasil penerimaan masukan dan tanggapan terhadap draf RPOJK dari stakeholder dan masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, adapun beberapa hal diatur dalam rancangan ketentuan ini mengenai penyusunan skema khusus untuk penyaluran atau pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit (*credit scoring*), serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/margin pembiayaan UMKM.

Selain itu, diatur pula kewajiban bagi lembaga jasa keuangan (LJK) untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM. "Adapun dalam RPOJK UMKM ini tidak terdapat kewajiban bagi

LJK untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit," tutur Dian dalam jawaban tertulisnya, Minggu (11/8/2024).

Diharapkan melalui RPOJK ini dapat meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan pemberdayaan UMKM. RPOJK UMKM merupakan amanat Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) yang juga bertujuan mendorong LJK (bank dan LJK non-bank) untuk dapat memberikan kemudahan terkait akses pembiayaan, termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat dan mampu bersaing.

"Sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," tutur Dian.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit UMKM per Juni 2024



tumbuh sebesar 6,7% secara *year on year* (yoy) menjadi Rp 1.375,2 triliun. Pertumbuhannya melambat dari bulan sebelumnya yang sebesar 7,3% (yoy). Komposisi kredit UMKM perbankan sebesar 18,57% terhadap total kredit perbankan sebesar Rp 7.403,5 triliun per Juni 2024.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 18,71%, komposisi kredit UMKM per Juni semakin menyusut dari target yang sebelumnya ditetapkan 30% pada akhir tahun ini. Bahkan, dibandingkan dengan Desember 2023, porsi kredit

UMKM sebesar 19,36% dari total kredit nasional, artinya komposisi UMKM semakin menyusut.

"Porsi kredit ke UMKM yang saya khawatir, seingat saya OJK punya ekspektasi di akhir 2024 porsinya minimal 30% secara industri. Tapi, dari tahun lalu sampai ke April melandai, tahun lalu porsinya hampir 20% dari total *outstanding* kredit, lama-lama mendekati 19%, kalau nggak ditahan bisa ke 18%, artinya pembiayaan ke non UMKM bertambah, sebaliknya UMKM stagnan," jelas Ekonom Senior dan Associate

Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPP) Ryan Kiryanto.

Menurut dia, dari hal tersebut, terdapat dua catatan yang perlu dicermati. Pertama, bagaimana bank memitigasi risiko kredit, sehingga penyaluran kredit UMKM bisa kembali meningkat. Kedua, ada spirit untuk memperbesar ceruk pasar ke UMKM, karena bagaimana pun UMKM bisa menjadi tulang punggung ekonomi, khususnya di lapis bawah.

Hingga semester I-2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang

masih menjadi bank penyalur kredit UMKM terbesar nasional. BRI telah menyalurkan kredit UMKM mencapai Rp 622,3 triliun, naik 7,7% (yoy). Nilai tersebut setara 81,96% dari total penyaluran kredit BRI.

BI juga mencatatkan, berdasarkan skala usahanya, kredit UMKM utamanya didorong dari skala mikro yang tumbuh 9,9% (yoy) menjadi Rp 639,2 triliun, melambat dari bulan sebelumnya yang naik 11,6% (yoy). Sementara itu, kredit kecil tumbuh 3,9% (yoy) per Juni 2024 menjadi Rp 430,9 triliun, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang naik 3,6% (yoy).

Kemudian, kredit menengah juga tumbuh lebih tinggi dari 4,3% (yoy) per Mei menjadi tumbuh 4,4% (yoy) per Juni 2024 senilai Rp 305 triliun. Dari jenis penggunaannya, kredit UMKM untuk investasi tumbuh 17,6% (yoy) per Juni 2024 menjadi Rp 372,3 triliun dan kredit UMKM modal kerja naik 3,2% (yoy) menjadi Rp 1.002,9 triliun.



Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota BPK

Calon anggota BPK Ahmad Adib Susilo (kedua kiri) bersama Jon Erizal (kiri) dan Roziqin (ketiga kiri) menyampaikan gagasan saat uji kepatutan dan kelayakan dengan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024). Sebanyak 75 orang calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengikuti uji kepatutan dan kelayakan untuk memastikan calon anggota yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan kualifikasi yang dibutuhkan, serta bertanggung jawab di lembaga tersebut.

Per Juli, Kredit Mikro Bank Mandiri Tumbuh 10,7%

JAKARTA, ID - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk hingga Juli 2024 telah menyalurkan kredit usaha mikro (KUM) kepada lebih dari 294 ribu UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai mencapai Rp 32,7 triliun. Penyaluran kredit tersebut terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan portofolio KUM yang meningkat 10,74% secara *year on year* (yoy).

Bank Mandiri menyediakan fasilitas KUR atau KUM yang dirancang khusus untuk petani tebu dengan skema bayar panen. Fasilitas ini menawarkan skema bayar panen, yang memungkinkan para petani untuk mengatur arus kas mereka dengan lebih fleksibel. Dengan demikian, kewajiban pembayaran dapat disesuaikan dengan waktu panen, yang kerap menjadi tantangan dalam pengelolaan usaha pertanian.

Hal tersebut menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan ekosistem pertanian nasional yang berkelanjutan dengan menjalin kemitraan strategis bersama

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), sub holding komoditi gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan. Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Surabaya, kedua perusahaan berkolaborasi dalam menyediakan solusi finansial yang terintegrasi untuk mendukung ekosistem SGN, khususnya bagi para petani tebu yang menjadi mitra utama.

Executive Vice President Corporate Banking VI Bank Mandiri Budi Purwanto dalam keterangannya menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar BMRI dalam memperluas ekosistem pertanian melalui digitalisasi dan inovasi layanan keuangan. Dia melihat bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Melalui digitalisasi dan kemitraan strategis seperti yang kami lakukan dengan SGN, kami berupaya menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, di mana para petani memiliki akses lebih mudah terhadap pembi-

ayaan sesuai dengan kebutuhan mereka," ungkap Budi, Senin (12/8/2024).

Untuk itu, Bank Mandiri menawarkan solusi digital yang inovatif bagi para petani dengan *Living by Mandiri*. *Super app* andalan perseroan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi finansial dan nonfinansial para petani tebu, agar dapat dengan mudah mengelola keuangan harian seperti pembayaran, transfer uang, *top-up e-wallet*, pembukaan rekening, dan ragam fitur unggulan lainnya.

Lebih lanjut, selain memberikan dukungan pembiayaan kepada petani, kerja sama ini juga mencakup penyediaan pembiayaan untuk *supplier* dan vendor melalui mekanisme *accepted invoice financing*. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasokan atau *value chain* ekosistem SGN, sehingga operasional bisnis dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Tak henti di situ, Bank Mandiri juga menawarkan layanan *payroll package* yang dirancang

untuk mempermudah pengelolaan gaji bagi pegawai SGN. Dalam layanan ini, pegawai SGN dapat mengakses berbagai produk perbankan seperti tabungan, asuransi, dan pinjaman dengan lebih mudah.

Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan dan kesejahteraan ekonomi pegawai, serta mendukung pencapaian tujuan keuangan mereka.

Bank berlogo pita emas ini berharap, sinergi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para petani tebu yang menjadi mitra SGN, serta mendukung terciptanya ekosistem pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan di Indonesia.

"Kami optimis bahwa kolaborasi ini akan membawa dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat. Kami ingin menjadi mitra strategis dalam membangun ekosistem pertanian yang modern dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk mendorong inklusi keuangan di berbagai sektor," imbuh Budi. (nid)

Sukuk Pegadaian
Diminati Investor

JAKARTA, ID - PT Pegadaian membukukan penjualan Rp 2,2 triliun atas dua jenis sukuk barunya selama masa *book building* pada 23 Juli hingga 6 Agustus 2024, jauh melebihi target yang hanya Rp 1,5 triliun. Kedua instrumen investasi tersebut berupa Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II.

"Saya ucapkan terima kasih ke masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Saya juga menghargai partisipasi aktif dari investor dan masyarakat atas pencapaian yang luar biasa ini," kata Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian dan Perencanaan Strategis Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

Ferdian mengatakan, peluncuran kedua jenis sukuk tersebut merupakan wujud konsistensi perusahaan dalam menjalankan prinsip *Environment, Social, dan Governance* (ESG) sekaligus memberikan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dana yang terkumpul tersebut

salah satunya akan digunakan dalam program dukungan terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kesetaraan gender (*gender equality*), serta memperluas akses finansial bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menyediakan produk-produk investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang signifikan," kata Ferdian.

Ia menyampaikan bahwa produk investasi sukuk Pegadaian memperoleh peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) dari PT Pernerang Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut merupakan yang tertinggi dari Pefindo, menandakan emiten sehat dan dapat menjadi pilihan investasi yang baik.

"Dengan peringkat obligasi dan sukuk AAA tersebut, investor dapat merasa aman berinvestasi di Pegadaian. Kinerja operasional dan keuangan perusahaan yang sangat sehat, serta risiko investasi yang minimal, memastikan keuntungan yang menjanjikan bagi para investor," imbuh Ferdian. (ks)

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwalianan"), dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("RUPO") pada tanggal 8 Agustus 2024, bertempat di Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang mewakili Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("Obligasi") sejumlah Rp1.190.250.000,00 atau sebanyak 1.190.250.000,00 suara yang merupakan 87,4059% dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Emiten") dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu berjumlah Rp1.361.750.000,00.

Dalam RUPO tersebut, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **abstain** sebanyak 16.000.000,00 suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp16.000.000,00.
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 8 Agustus 2024, pada Pilihan 1 sebanyak 472.250.000,00 suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp472.250.000,00 atau 40,39%.
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO tanggal 8 Agustus 2024 (sesuai dengan Pilihan 1 yang telah dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memilih Pilihan 2 sebanyak 700.000.000,00 suara atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp700.000.000,00 atau 59,61%.

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPO tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) Perjanjian Perwalianan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 75% dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, sehingga RUPO tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 13 Agustus 2024



PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK



PT BANK MEGA TBK